

Pemimpin Ummat : Ulama, Cendekiawan atau Politisi

Berbagai pendapat tentang siapa yang selayaknya menjadi pemimpin ummat : ulama, cendekiawan atautkah politisi ? Acapkali membuat kita terjebak ke dalam pertentangan. Meskipun demikian, adalah tidak bijak bila kemudian tidak menyimak keseluruhan pendapat tersebut. Perlukah seorang ulama atau kiai terjun ke dalam politik praktis ? RISALAH mencoba menurunkan berbagai pendapat di atas dan membaginya ke dalam beberapa bagian yang dipisahkan, agar mudah difahami.

Ustadz Hud A. Musa, Ketua Perwakilan PP PERSIS Wilayah Timur, Wakil Pimpinan Pesantren PERSIS Bangil dan Staf Redaksi Majalah AL Muslimun.

"Sebenarnya, kita sudah terjebak ke dalam petak-petak. Padahal seorang muslim itu harus syamil (utuh). Apakah dia ulama atau cendekiawan, ia harus mempunyai



pandangan yang utuh tentang Islam. Jadi tidak bisa seorang kiyai atau ustadz tidak boleh berpolitik, lalu cendekiawan saja yang berpolitik. Sementara kiyai hanya berorientasi kepada masalah fiqh keagamaan. Jadi pemahaman seorang muslim itu harus utuh, dalam pengertian bahwa Islam itu mencakup semua aspek kehidupan. Sekarang

ini, sudah terjadi kesalahan yang cukup mendasar. Kita terjebak kepada figuritas, yaitu kebergantungan kepada tokoh-tokoh tertentu. Ini jelas merupakan salah satu penyakit yang merusak da'wah Islam. (Sebab) da'wah figuritas mengakibatkan ummat semakin bodoh, sedangkan tokohnya semakin melambung. Pada gilirannya akan merusak Tauhid yaitu munculnya kultus individu. Hal ini terjadi pada masa ummat Nabi Musa. Baru ditinggalkan 40 hari oleh Nabi Musa yang mengajak bertauhid kepada Allah, mereka sudah murtad. Semua ini tidak terlepas dari adanya figuritas tersebut.

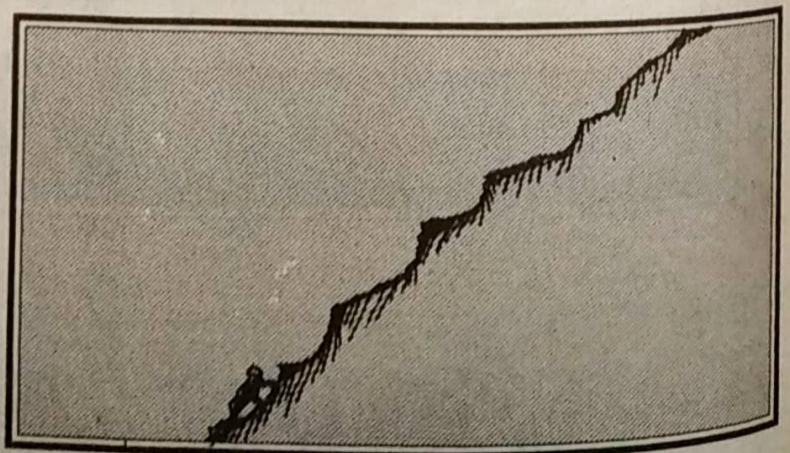
Melihat kepincangan yang demikian ini,

tentunya harus ada pembenahan sistem, terutama pada figur kepemimpinan. Saya fikir, melihat kepemimpinan ummat Islam di Indonesia bukan masalah figur lagi, melainkan jama'ah. Apakah kita sudah berjama'ah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Kiyai yang terjun ke dalam politik (praktis -red), kadang-kadang pandangan Islamnyapun tidak syamil. Mereka tidak sadar bahwa mereka berpolitik dengan orang kafir, bersosial dan berbudaya dengan orang kafir. Bahkan bertingkah laku seperti mereka.

Untuk menjadi seorang pemimpin Islam, telah diterangkan di dalam Al Qur'an surat Ali 'Imran : " Jadilah dirimu seorang penyembah-Ku dan jadilah dirimu seorang yang Rabbani."

Dalam konteks di atas, ciri orang Rabbani adalah orang yang mau mempelajari Al Kitab dan mengajarkannya. Tegasnya disini, untuk menjadi seorang organisatoris yang baik, baik pemimpin organisasi politik maupun kemasyarakatan, dia harus mau belajar dan mengajar. Ini yang sangat penting. Kenyataan yang ada sekarang ini sudah berbeda. Seorang pemimpin hanya mau mengajar,





tidak pernah mau belajar. Inilah kelemahan kepemimpinan umat Islam sekarang ini." ■ SP

KH. M. Rusyad Nurdin, Ketua DDII Jabar.

"Sebenarnya bukan terletak pada ulama atau tokoh politik. Sebuah partai politik harus dipimpin oleh orang yang memahami seluk beluk politik. Apakah ia seorang

ulama atau bukan, itu tidak jadi soal. Sebuah partai Politik Islam harus dipimpin oleh orang yang memahami Islam dan mengerti seluk beluk politik, serta berjiwa Islam. Seperti Nabi Muhammad Saw, Abu Bakar, Umar, Ali, dan lain-lain. Mereka adalah Ulama dan sekaligus sebagai pemimpin negara.

Ulama yang memberikan langsung perhatian kepada partai politik itu tidak jadi soal. Karena Islam dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Cuma yang menjadi pokok adalah, ulama harus bisa menempatkan diri. Kalau ada ulama yang tidak mengerti politik, hendaknya membina pesantren. Nampaknya ini lebih bermanfaat. Kalau dia ikut politik, sedangkan buta terhadap politik, artinya kehadirannya tidak ada arti sama sekali. Sedangkan pesantren ia tinggalkan. Ini merupakan kerugian bagi kita.

Pengaruh Partai Politik Islam sekarang ini, saya lihat tidak mengakar kedalam tubuh umat. Sebabnya, yang tampil bukan pemimpin-pemimpin yang dikehendaki oleh umat. Hubungan antara Partai Politik dengan umat tidak rapat.

Umat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memahami ajaran Islam dan yang mempunyai pandangan luas tentang kenegaraan. Diantara sifat-sifat Pemimpin dalam Islam itu adalah: 1. Iman yang kuat, dengan iman yang kuat akan timbul sikap keberanian untuk menegakkan keadilan. 2. Iffah, memelihara kehormatan diri, integritas. 3. Hikmah, Kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. 4. Adil. Sebab tujuannya ialah: untuk menegakkan dan mewujudkan kemanusiaan, dan keadilan.

Oleh sebab itu hendaknya para ulama menuntun orang-orang berpolitik itu kedalam jalan Isla yang benar. Kalau ada orang yang ingin menjadi pemimpin, lalu minta bantuan dan dukungan kepada ulama, hendaknya para ulama tidak melayani orang seperti itu. Sebab orang yang menginginkan jabatan, itu merupakan aib dan cela dalam Islam. Contohnya diwaktu paman Nabi yang bernama Abbas, meminta

kepada Nabi supaya urusan Ka'bah dan urusan air bagi jema'ah haji diserahkan kepada beliau. Rasulullah yakin pamannya itu akan melaksanakan tugas ini dengan baik, tetapi Nabi bersabda "Kami tidak mau menyerahkan urusan kami, yakni urusan umat kepada orang yang memintanya. Apalagi kalau sekiranya kita melihat seorang yang minta bantuan untuk menjadi pemimpin itu mempunyai niat untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dengan cara demikian, ulama memberikan sumbangan yang nyata dan baik bagi perkembangan partai politik Islam selanjutnya. Ulama harus tahu apa yang harus dikerjakannya." ■ AH

Drs. H. Shiddiq Amin, Ketua Bidang Jam'iyah PP PERSIS dan Pimpinan Pesantren PERSIS Benda, Tasikmalaya.



"Sejarah ketatanegaraan yang pernah berlaku pasca Rasulullah adalah khilafah atau imamah. Jadi kalau saya lihat, sebetulnya dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara Imam politik dan Imam agama dalam pengertian khusus. Karena, Imam negara

berarti pula Imam Shalat. Kemudian pada perkembangan berikutnya, karena mungkin pengaruh pemikiran Barat, Nashara, lalu ada pemisahan seakan-akan ada Imam Negara dan Imam agama. Jadi, ada dikotomi.

Padahal umat Islam mendambakan imam yang utuh. Tapi itu bukan pekerjaan mudah. Sehingga, ada konsep bahwa Imam-imam dalam organisasi-organisasi Islam itu dinilai "Taquumu maqaama Daulah". Dalam hal-hal tertentu dia menempati posisi Imam daulah (negara), seperti dalam mengurus zakat, haji, ekonomi yang Islami, tetapi dalam skop dan ruang lingkup yang terbatas. Karena Imam daulah tidak memperhatikan pada hal yang sama.

Menurut saya, kini batas antara Cendekiawan dan Ulama itu sudah begitu tipis. Karena tidak sedikit ulama yang menjadi cendekiawan dan cendekiawan yang mengarah pada ulama. jadi posisinya pun tidak terlalu berbeda sementara itu dikalangan partai politik yang ada, kita masih melihat kecenderungan sebagian besar lebih terarah pada kepentingan pribadi, unsur, primordialisme, dsb. Kemudian, ada gejala berebut "lahan". Jadi bukan melihat siapa yang lebih layak jadi pemimpin Terbukti lagi bahwa mereka baru memperhatikan suara umat itu menjelang pemilu. Kalau melihat orangnya —bukan Partai Politiknya— kita dapat banyak Cendekiawan Muslim di Golkar yang lebih realistik memberi kontribusi yang menguntungkan umat Islam. ■ TR